

**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA
(LKJ)**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru tahun 2018 ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru dalam mewujudkan akuntabilitas BPBD Kota Banjarbaru dalam melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Banjarbaru Tahun 2018.

Kami merasa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, selanjutnya untuk ke depan jika masih ada kekurangan akan kami sempurnakan sehingga setiap prioritas aksi diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Akhirnya Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah mendukung tersusunnya Buku LKJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru tahun 2017, lebih khusus kepada Tim Penyusun. Semoga buku ini dapat menjadi dokumen dan bahan evaluasi untuk pelaksanaan Tugas dan fungsi BPBD Kota Banjarbaru pada tahun berikutnya, komitmen semua pihak yang selama ini sudah terjalin dengan baik perlu terus dipertahankan dan semoga bisa lebih ditingkatkan.

Banjarbaru, Januari 2019

**KEPALA PELAKSANA BPBD
KOTA BANJARBARU,**

Surianoo Akhmad, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19620101 198303 1051

DAFTAR ISI

Halaman..

BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	6
C. VISI, MISI TUJUAN DAN STRATEGI	17
1. VISI.....	17
2. MISI	17
D. TUJUAN DAN STRATEGI.....	17
BAB II.....	17
PERENCANAAN KINERJA	17
3. TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	23
A. RENCANA KERJA TAHUN 2018	21
B. PENETAPAN KINERJA	24
BAB III.....	25
AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	25
B. ANALISA CAPAIAN KINERJA	27
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	33
BAB IV	34
PENUTUP.....	34
C. KESIMPULAN	34
D. REKOMENDASI	34

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk perlindungan atas **bencana**, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan/permukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
4. Menghargai budaya lokal.

5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetia kawan dan kederawanan.
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen PU, dll. Begitu pula pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru. Selain itu untuk memberikan kekuatan hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalimantan Selatan, maka telah ditetapkan perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kalimantan Selatan melalui inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban kinerja kepala pelaksana BPBD dalam rangka mewujudkan akuntabilitas BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kota Banjarbaru pada tahun 2016, yang secara langsung menggambarkan keberhasilan, hambatan dan tantangan.

Sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kota Banjarbaru Tahun 2016 ini disusun dengan menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja di bagian penanggulangan bencana. Laporan ini juga merupakan wujud dari transparansi BPBD Kota Banjarbaru dalam melaksanakan berbagai kewajiban serta menyajikan capaian seperangkat indikator kinerja BPBD Kota Banjarbaru.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru. BPBD merupakan lembaga teknis daerah yang berada di bawah Pemerintah Kota Banjarbaru yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru secara *ex officio*.

Pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru memiliki Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

- a. Menetapkan Pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Uraian Tugas Pokok

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana alam secara adil dan merata.
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulanagn bencana.
- d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan

dan pengembangan informasi peta rawan bencana.

- e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana.
- f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- h. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- j. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas.

Unsur-unsur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru adalah :

- 1. Pengarah Penanggulangan Bencana
- 2. Pelaksana Penanggulangan Bencana

Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara rinci uraian tugas Pengarah Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana daerah.
- b. Menganalisa dan mengembangkan informasi peristiwa bencana daerah.
- c. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana daerah.

- d. Menghimpun dan menginventarisasi kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- e. Merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- f. Merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana daerah.
- g. Merumuskan dan menyusun konsep kerjasama penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- h. Memantau dan mengevaluasi efentifitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- i. Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Secara rinci uraian tugas kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana.
- b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana.
- c. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana.
- d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana.

- e. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.
- f. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- g. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana.
- h. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dan penanggulangan bencana.
- i. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat.
- j. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana.
- k. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana.
- l. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana.
- m. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan.
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya

Unsur-unsur organisasi pelaksana penanggulangan bencana terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kebakaran;
3. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
4. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. Satuan Tugas.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan program, mengelola rumah tangga, surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan pegawai, keuangan, perlengkapan aset, kehumasan dan keprotokolan. Secara rinci uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha Badan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

- 1). Mengkoordinasikan dalam penyusunan rencana strategis, rencana program kerja, dan kegiatan tata usaha dan badan;
- 2). Mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan kepegawaian dan umum;
- 3). Mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan pegawai, keuangan, perlengkapan dan aset;
- 4). Menyelenggarakan kehumasan dan keprotokolan;
- 5). Mengkoordinasikan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan tahunan, laporan keuangan dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 6). Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Sekretariat; dan
- 7). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Kesiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan. Secara rinci uraian tugas Seksi Pencegahan dan Kesiagaan adalah sebagai berikut :

- 1). Menyusun rencana kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan kebakaran;

- 2). Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian bencana dan pengembangan kesiapsiagaan atas bencana dan kebakaran;
- 3). Menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman, resiko bencana, data kesiapsiagaan atas ancaman bencana dan kebakaran;
- 4). Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- 5). Menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana;
- 6). Menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- 7). Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana;
- 8). Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana, inventarisasi dan analisis penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- 9). Melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar;
- 10). Melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat, pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana;
- 11). Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini serta penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana;

- 12). Melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana;
- 13). Melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana, analisis resiko bencana, dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan;
- 14). Menyusun laporan kinerja Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kebakaran;
- 15). Mengevaluasi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan kebakaran; dan
- 16). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian dan penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan hidup dasar dan logistik pada saat tanggap darurat. Secara rinci uraian tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai berikut :

- 1). Menyusun rencana kegiatan penangan kedaruratan dan kebutuhan logistik;
- 2). Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kedaruratan dan logistik;
- 3). Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian terhadap lokasi bencana dan tingkat kerusakan bencana;
- 4). Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat bencana;
- 5). Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, dan kelompok rentan akibat bencana;

- 6). Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum, pemerintahan, sumberdaya alam/buatan, kebutuhan dasar dan logistic;
- 7). Menyusun petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana serta identifikasi dan inventarisasi pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik;
- 8). Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penyediaan penampungan dan tempat hunian;
- 9). Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi serta pengerahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
- 10). Menyusun laporan kinerja Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- 11). Mengevaluasi kegiatan Kedaruratan dan Logistik; dan
- 12). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana. Secara rinci uraian tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut :

- 1). Menyusun rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penyelenggaraan penanggulangan daerah rawan bencana dan pasca bencana;
- 2). Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, data kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek-aspek social, ekonomi dan budaya masyarakat;

- 3). Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana, rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana;
- 4). Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan;
- 5). Menyiapkan bahan, dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik;
- 6). Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan prasarana dan sarana umum dan keagamaan, pemulihan kondisi sosial psikologis masyarakat, pelayanan kesehatan korban bencana, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- 7). Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangunan yang tepat, penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan bencana, pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan pelayanan publik;
- 8). Menyusun laporan kinerja seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 9). Mengevaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- 10). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

a. Satuan Tugas

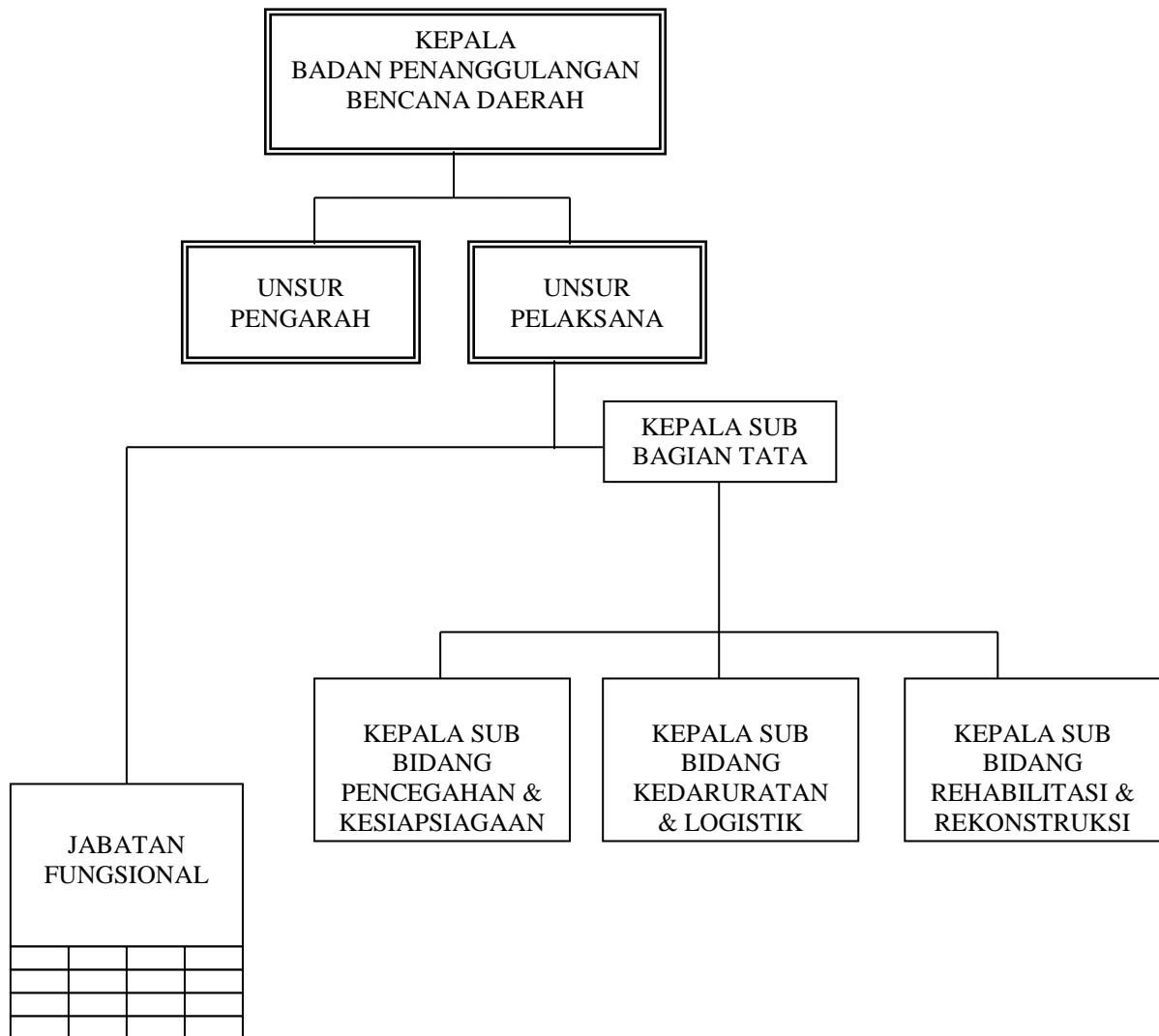
Satuan tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana.

b. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam kelancaran pelaksanaan organisasi penanggulangan bencana daerah.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 22 Mei dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



C. VISI, MISI TUJUAN DAN STRATEGI

1. VISI

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru adalah:

“TERDEPAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA”.

2. MISI

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat BPBD dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan administrasi melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan yang profesional, peningkatan sarana dan prasarana kantor serta peningkatan SDM aparatur.
2. Merwujudkan kesiapsiagaan semua pihak dalam menghadapi bencana dan pencegahan untuk mengurangi risiko bencana.
3. Melaksanakan tanggap darurat, pemenuhan logistik, peralatan dan kebutuhan dasar pada saat terjadi bencana.

Melaksanakan perbaikan darurat rehabilitas dan rekonstruksi infrastruktur, sosial ekonomi, sosial psikologi pasca bencana.

D. TUJUAN DAN STRATEGI

1. Meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana yang dilengkapi dengan memiliki dua sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang dilengkapi dengan strategi Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar mengenai penanggulangan bencana serta kebijakan Menyediakan informasi mengenai penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pelajar.
 - b. Meningkatkan partisipasi dunia usaha yang dilengkapi dengan strategi Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha serta kebijakan Menyediakan informasi jumlah korban bencana yang diberikan bantuan

2. Meningkatkan kinerja BPBD dengan memiliki satu sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya pelayanan BPBD yang dilengkapi dengan sasaran Memperoleh informasi tentang penanggulangan bencana serta kebijakan Mengikuti diklat.

Untuk masing-masing rencana pencapaian indikator kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJM (2016-2021) dan RENSRTA (2016-2021) dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun (2016-2021)						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJM, yaitu :									
I	Tingkat kepuasan pelayanan terhadap korban bencana		Puas	Puas	Puas	Puas	Puas	Puas	
II	Jumlah bencana yang di tangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
III	Jumlah perusahaan yang memberikan bantuan		2 Perusahaan	2 Perusahaan	2 Perusahaan	2 Perusahaan	2 Perusahaan	2 Perusahaan	
Ketiga Indikator di atas diterjemahkan kedalam 1 Indikator Program									
A.	Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam		80	82	85	88	92	95	95

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PP No. 29 Tahun 2014 mendefinisikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP salah satunya meliputi rencana strategis dan perjanjian kinerja.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dengan upaya peningkatan kinerja instansi yang bersangkutan.

Perencanaan strategis kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan. Rencana ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran strategis serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah untuk suatu periode tertentu.

Selanjutnya disusun dokumen penetapan kinerja atau perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja

merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota

Banjarbaru telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2018 setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan komitmen Inspektur kepada Walikota Banjarbaru untuk berkinerja, sesuai dengan apa yang diperjanjikan

berdasarkan tugas, pokok, fungsi, wewenang dan Sumber daya yang dimiliki yaitu dalam tabel berikut ini. Berikut ini merupakan perjanjian kinerja tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru per Februari 2018.

**Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana
Kota Banjarbaru Tahun 2018**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	1. Cakupan pelaksanaan penanggulangan bencana dan tanggap darurat	85%
	Cakupan wilayah tanggap darurat bencana	2. Jumlah desa siaga bencana	N/A
	Meningkatnya Responsifitas dalam penanganan bencana	3. Cakupan tertanganinya korban bencana	85%

	Program		Anggaran
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	379.514.200,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	311.922.000,-
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	46.000.000,-
4.	Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	27.612.700,-
5.	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rp	436.085.300,-
6.	Penanganan tanggap darurat bencana	Rp	403.627.000,-
7.	Pasca Bencana	Rp	48.429.000,-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KOTA BANJARBARU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Kepuasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 %
2.	Terpenuhinya sarana prasarana kantor	Sarana dan prasarana kerja dalam kondisi baik	100 %
3.	Meningkatnya kinerja fisik dan keuangan	Persentase realisasi fisik dan keuangan Nilai SAKIP BPBD	100 % A

Kegiatan		Anggaran	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik	Rp	23.600.000,-
2.	Penyediaan Kebersihan Kantor	Rp	51.0000.00,-
3.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	16.581.000,-
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	17.480.000,-
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	34.996.200,-
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	3.600.000,-
7.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	41.307.000,-
8.	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	166.950.000,-
9.	Penyediaan Jasa Non PNS	Rp	24.000.000,-
10.	pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Rp	144.450.000,-
11.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp	32.768.000,-
12.	Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp	118.972.000,-
13.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp	4.370.000,-
14.	Pemel. Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp	8.740.000,-
15.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Rp	2.622.000,-
16.	Pengadaan Pakaian Khusus Petugas Pelayanan	Rp	46.000.000,-
17.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Rp	21.102.700,-
18.	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Rp	6.510.000,-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BANJARBARU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan korban bencana	Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	6 kali
		Cakupan Tersedianya Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam	100%
		Terlaksananya Apel Siap Siaga Bencana	1 kegiatan
		Terlaksananya Simulasi Siaga Bencana	1 kegiatan

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Rp 178.500.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam	Rp 68.460.000,-
3.	Peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana	Rp 89.725.800,-
4.	Simulasi dan Peningkatan Keterampilan Aparat Penanggulangan Bencana	Rp 99.399.500,-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BANJARBARU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Responsifitas dalam penanganan bencana	Persentase Tersedianya logistik untuk pemulihan bencana	100 %
		Cakupan operasional Pusdalops PB	100 %

Kegiatan	Anggaran
1. Pengerahan SDM dan Logistik untuk Pemulihan Darurat Penanggulangan Bencana	Rp 102.858.000,-
2. Pos Komando Siaga Bencana	Rp 300.769.000,-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BANJARBARU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Responsifitas dalam penanganan bencana	Cakupan terdatanya dampak kejadian bencana	100%
		Persentase terkoordinasinya dengan pihak – pihak yang terkait dengan kejadian bencana	100%

Kegiatan		Anggaran	
1.	Pendataan dampak kejadian bencana	Rp	32.793.000,-
2.	Pengembangan partisipasi dan kerja sama rehabilitasi dan rekonstruksi	Rp	15.636.000,-

3. TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru yang dijabarkan dari misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan administrasi perkantoran kebencanaan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan memiliki dua sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang dilengkapi dengan strategi Penyediaan fasilitas kerja yang lengkap dan memadai agar berdaya guna dan berhasil guna serta Kebijakan Penyediaan fasilitas kerja secara efisien sesuai keperluan perkantoran.

- b. Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang dilengkapi dengan strategi Penyediaan fasilitas kerja yang lengkap dan memadai agar berdaya guna dan berhasil guna serta kebijakan Diprioritaskan pada pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana aparatur.
2. Mengendalikan kinerja keuangan secara akuntabel dengan memiliki satu sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilengkapi dengan strategi Penyediaan fasilitas kerja yang lengkap dan memadai agar berdaya guna dan berhasil guna serta kebijakan Pembuatan pelaporan kinerja dan keuangan yang dilakukan secara "team work" secara berkala melalui evaluasi rutin triwulanan.
3. Meningkatkan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas memiliki satu sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya disiplin aparatur yang dilengkapi dengan strategi Penyediaan perlengkapan pendukung dan sistem yang kondusif bagi penegakan disiplin PNS serta kebijakan Penyediaan pakaian kerja dan perlengkapannya.
1. Meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana yang dilengkapi dengan memiliki dua sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang dilengkapi dengan strategi Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar mengenai penanggulangan bencana serta kebijakan Menyediakan informasi mengenai penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pelajar.
 - b. Meningkatkan partisipasi dunia usaha yang dilengkapi dengan strategi Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha serta kebijakan Menyediakan informasi jumlah korban bencana yang diberikan bantuan
4. Meningkatkan Pelayanan Tanggap Darurat yang Cepat dan Tepat memiliki dua sasaran yaitu :
 - c. Meningkatnya Pelayanan Tanggap Darurat yang Cepat dan Tepat mengenai penanggulangan bencana serta menyediakan informasi jumlah korban bencana kepada masyarakat dan pelajar serta pihak terkait maupun melakukan sosialisasi ke beberapa daerah rawan bencana
 - d. cakupan wilayah tanggap darurat bencana mengenai menyediakan alat komunikasi dan mengadakan simulasi maupun sosialisasi pada pihak pihak terkait
5. Meningkatkan Responsifitas Dalam Penanganan Bencana memiliki satu sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya Responsifitas Dalam Penanganan Bencana dalam memberikan bantuan pada korban bencana

Untuk masing-masing rencana pencapaian indikator kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJM (2016-2021) dan RENSRTA perubahan (2016-2021) dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun (2016-2021)					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJM, yaitu :								
I	Tingkat kepuasan pelayanan terhadap korban bencana		Puas	Puas	Puas			
II	Jumlah bencana yang di tangani		100%	100%	100%			
III	Jumlah perusahaan yang memberikan bantuan		2 Perusahaan	4 Perusahaan	0 Perusahaan			
Ketiga Indikator di atas diterjemahkan kedalam 7 Indikator Program								
A.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	N/A	76.14	100%	100%	100%	100%	100%
B.	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C.	Cakupan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D.	Cakupan Disiplin Aparatur	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
E.	Persentase Ketetapan Tingkat Waktu Tanggap	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
F.	Peresentase tertanganinya korban bencana	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%

A. RENCANA KERJA TAHUN 2018

Upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam RENSTRA Perubahan BPBD tahun 2016-2021, maka ditetapkan indikator kinerja dari masing-masing program sebagai berikut :

Tabel 2.

Rencana Kerja dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2018

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Tersedianya jasa telepon & Internet
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan buku peraturan
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanin harian pegawai, makmin rapat dan makmin tamu
	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi/konsultasi
	Penyediaan jasa Non PNS	Jumlah tenaga kontrak
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasara Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur
	Tersedianya gedung kantor	Tersedianya gedung kantor
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4

	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor
	Pemeliharaan rutin berkala mebeleur	Terpeliharanya gedung kantor
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Memiliki Kopetensi Sesuai Bidanganya
	Pengadaan Pakaian Khusus Petugas Pelayanan	Terlaksannya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupana Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	Tersusnya Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Tersusnya Perencanaan dan Pelaporan Manajemen
V	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Ketetapan Tingkat Waktu Tanggap
	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Terlaksannya Sosialisasi Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi	Cakupan Tersedianya Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam
	Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Bencana	Terlaksannya Apel Siap Siaga Bencana
	Simulasi dan Peningkatan Keterampilan Aparat Penanggulangan Bencana	Terlaksannya Simulasi Siaga Bencana
VI	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Peresentase tertanganinya korban bencana
	Pengeralahan SDM dan Logistik Untuk Pemulihan Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase Tersedianya Logistik untuk pemulihan bencana
	Pos Komando Siaga Bencana	Cakupan operasional Pusdalops PB
VII	Program Pasca Bencana	Peresentase tertanganinya korban

		bencana
	Pendataan Dampak Kejadian Bencana	Cakupan terdatanya dampak kejadian bencana
	Pengembangan Partisipasi dan Kerjasama Rehabilitasi dan Rekontruksi	Persentase terkoordinasinya dengan pihak - pihak yang terkait dengan kejadian bencana

Total alokasi anggaran pembangunan pada BPBD Kota Banjarbaru yang dianggarkan melalui dana APBD tahun 2018 berjumlah Rp.2.865.179.600,- yang terdiri dari Rp. 1.180.987.400,- Belanja tidak langsung dan Rp. 1.684.196.200,- Belanja langsung, dengan rincian berdasarkan program sebagai berikut :

Tabel 3.
Rencana Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2018

No	Program	Besarnya Anggaran
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp1.180.987.400
1.	Belanja pegawai	Rp. 1.180.987.400
	BELANJA LANGSUNG	Rp. 1.684.196.200
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 379.514.200
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 311.922.000
3.	Program Peningkatan Displin Aparatur	Rp. 78.500.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 27.612.700
5.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencan Alam	Rp. 436.085.300
6.	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Rp. 403.654.000
7.	Program Pasca Bencana	Rp. 46.908.000
	TOTAL	Rp.2.865.179.600

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BPBD Kota Banjarbaru telah membuat penetapan kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penetapan Kinerja BPBD Kota Banjarbaru Tahun 2018 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2018 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2018. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2018 selengkapnya terdapat pada Tabel 4.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kinerjanya. Untuk itu, sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Indikator kinerja tersebut disebut dengan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators). Capaian indikator kinerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Indikator kinerja utama di lingkungan BPBD Kota Banjarbaru disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis BPBD Kota Banjarbaru, serta dengan mencoba mengakomodasikan keinginan para stakeholder. Indikator kinerja utama ini juga menggambarkan satu program utama penanggulangan bencana yang difokuskan pada:

1. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Indikator kinerja utama yang dirumuskan ini memang masih jauh dari sempurna, namun diharapkan telah memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil-hasil yang akan diwujudkan oleh BPBD Kota Banjarbaru. Kedepan, kami akan selalu melakukan review terhadap indikator kinerja utama ini agar selalu dapat menggambarkan kesesuaian dengan harapan masyarakat tentang BPBD Kota Banjarbaru.

Capaian Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Banjarbaru tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap Darura	%	85	85	100

Sementara untuk capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Lampiran 1. Pencapaian Kinerja
Tingkat SKPD**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru

Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Tanggap Darurat yang Cepat dan Tepat	Persentase ketepatan tingkat waktu tanggap	94 %	94%
Meningkatnya pelayanan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat	100 %	100%
Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Kepuasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Meningkatnya kinerja fisik dan keuangan	Persentase realisasi fisik dan keuangan	100 %	100 %
	Nilai SAKIP BPBD	A	B
Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan korban bencana	Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	6 kali	6 kali
	Cakupan Tersedianya Sarana dan	100%	100%

	Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam		
	Terlaksananya Apel Siap Siaga Bencana	1 kegiatan	1 kegiatan
	Terlaksananya Simulasi Siaga Bencana	1 kegiatan	1 kegiatan
Responsifitas dalam penanganan bencana	Persentase Tersedianya logistik untuk pemulihan bencana	100 %	100 %
	Cakupan operasional Pusdalops PB	100 %	100 %
	Cakupan terdatanya dampak kejadian bencana	100%	100%
	Persentase terkoordinasinya dengan ppihak – pihak yang terkait dengan kejadian bencana	100%	100%

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat akuntabilitas dan kinerja di instansi pemerintah, maka BPBD Kota Banjarbaru melakukan evaluasi. Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP dilakukan dengan menelaah satu per satu tahapan siklus Sistem AKIP, mulai dari perencanaan kinerja (performance plan), pengukuran kinerja (performance measurement) hingga pelaporan kinerja (performance report) dan evaluasi kinerja (performance evaluation). Penelaahan atas tahapan perencanaan kinerja akan dilakukan bersamaan dengan pembahasan atas perencanaan strategis dan pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi menunjukkan, secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi serta rencana kinerja 2018 telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pencapaian target kinerja pada akhir tahun 2018 yang terdiri dari 7 program prioritas yang dituangkan kedalam 26 kegiatan APBD yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- A. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan sasaran meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan tujuan untuk Menyelenggarakan administrasi perkantoran kebencanaan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan. Target tersebut telah diwujudkan melalui pelaksanaan dan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1. Tersedianya jasa telepon & internet	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2. Jumlah petugas kebersihan kantor	6 orang	6 orang	100%
3.	Penyediaan alat tulis kantor	3. Tersedianya alat tulis kantor	28 Jenis	28 Jenis	100%
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	6 jenis	100%
5.	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5. Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	3 jenis	100%
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6. Tersedianya bahan bacaan , surat kabar dan buku peraturan	12 bulan	12 bulan	100%
7.	Penyediaan makanan dan minuman	7. Tersedianya Makmin harian pegawai, Makmin rapat dan Makmin tamu	12 Bulan	12 Bulan	100%
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8. Jumlah pelaksanaan rapat dan makmin tamu	1 tahun	1 tahun	100%
9.	Penyediaan Jasa Non PNS	9. Jumlah tenaga kontrak	2 orang	2 orang	100%

- B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan tujuan yang sama dengan program pelayanan administrasi perkantoran yaitu Menyelenggarakan administrasi perkantoran kebencanaan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan. Target tersebut telah diwujudkan melalui pelaksanaan dan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	1 pajket	100 %
2.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	12 bulan	12 bulan	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	12 bulan	12 bulan	100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100 %
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100%
6.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya gedung kantor	12 buah	12 buah	100%

Sementara untuk kegiatan yang lain telah terlaksana dengan baik, sesuai dengan target kontrak kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018.

- C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan sasaran meningkatnya disiplin aparatur serta tujuan meningkatkan pakaian dinas beserta kelengkapannya dalam melaksanakan tugas. Target tersebut telah diwujudkan melalui pelaksanaan dan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pengadaan pakaian khusus petugas pelayanan	1. Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 paket	1 paket	100%

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan sasaran meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta bertujuan untuk mengendalikan kinerja keuangan secara akuntabel. Target tersebut telah diwujudkan melalui pelaksanaan dan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	1. Tersusunnya perencanaan dan pelaporan keuangan	10 laporan	10 laporan	100 %
2.	Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	2. Tersusunnya perencanaan dan pelaporan manajemen	10 dokumen	10 dokumen	100 %

E. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan sasaran Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan korban bencana. Target tersebut telah diwujudkan melalui pelaksanaan dan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	6 kali	6 kali	100 %

2.	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi	Cakupan Tersedianya Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam	100%	100%	100%
3.	Peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana	Terlaksananya Apel Siap Siaga Bencana	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
4.	Simulasi dan peningkatan keterampilan aparat penanggulangan korban bencana	Terlaksananya Simulasi Siaga Bencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

F. Program Penanganan tanggap darurat bencana dengan sasaran Responsifitas dalam penanganan bencana. Target tersebut telah diwujudkan melalui pelaksanaan dan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pengarahan SDM dan logistik untuk pemulihan darurat penanggulangan bencana	Persentase Tersedianya Logistik untuk pemulihan bencana	100%	100%	100 %
2.	Pos komando siaga bencana	Cakupan operasional Pusdalops PB	100%	100%	100%

G. Program Pasca Bencana memiliki sasaran yang sama dengan program penanganan tanggap darurat bencana yaitu responsifitas dalam penanganan bencana. Target tersebut telah diwujudkan melalui pelaksanaan dan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pendataan dampak kejadian bencana	Cakupan terdatanya dampak kejadian bencana	100%	100%	100 %
2.	Pengembangan partisipasi dan kerjasama rehabilitasi dan rekontruksi	Persentase terkoordinasinya dengan pihak - pihak yang terkait dengan	100%	100%	100%

		kejadian bencana			
--	--	------------------	--	--	--

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berhubung taerget jangka menengah kegiatan/program yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru 2016-2021 terlaksananya sampai sekarang dilaksanakan baru 3 (tiga) tahun berjalan, maka sebagai bahan perbandingan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja hanya dapat dibandingkan dengan 1 (satu) tahun kebelakang yaitu tahun 2017 yang lalu.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dan 2018 adalah seperti tergambar pada table dibawah ini:

No	Program	Sasaran	Target Renstra		Realisasi	
			2017	2018	2017	2018
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	99,17	99,96
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	100%	100%	94,83	91,97
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan disiplin aparatur	100%	100%	98,17	79,69
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	99,86	99,98
5.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Presentase Ketepatan Tingkat Waktu Tanggap	100%	100%	96.52	99,88
6.	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase Penanggulangan Kebakaran	N/A	100%	N/A	98,42
7.	Program Pasca Bencana	Presentase Tertanganinya Korban Bencana	N/A	100%	N/A	88,07

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Sasaran Strategis	Indikator kinerja utama	Realisasi 2018	Target sesuai RPJMD		
			2019	2020	2021
Meningkatnya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap Darurat	85%	88	92%	95%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan alokasi anggaran BPBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018, pagu dan realisasi anggaran per program dapat dirinci sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	379.514.200,-	379.374.846,-	99,96
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	311.922.000,-	286.873.700,-	91,97
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	78.500.000,-	62.560.000,-	79,69
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	27.612.700,-	27.606.000,-	99,98
5.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	436.085.300,-	435.571.000,-	99,88
6.	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	403.654.000,-	397.283.000,-	98,42
7.	Program Pasca Bencana	46.408.000,-	40.873.000,-	88,07
	TOTAL	1.684.196.200,-	1.630.141.546,-	96,79

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk menjadi pertanggungjawaban kinerja kepala pelaksana BPBD dalam rangka mewujudkan akuntabilitas BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kota Banjarbaru pada tahun 2016.

C. KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan penanggulaangan bencana di Kota Banjarbaru telah dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan dapat tertanganinya korban bencana angin puting beliung di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang, yang bekerjasama dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan Kelurahan Syamsuddin Noor terkait dengan pemberian bantuan logistik kepada korban bencana.

Akuntabilitas keuangan sudah cukup baik dimana realisasi akhir tahun 2018 sebesar 96,79% (dari pagu sebesar Rp. **1.684.196.200,-** yang terserap sebesar **1.630.141.546,-**

Sangat disadari bahwa kondisi bencana di Kota Banjarbaru pada waktu ke waktu tentu berbeda, sehingga perlu penyesuaian beberapa aspek agar dapat diterapkan pada wilayah masing-masing.

D. REKOMENDASI

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana yang belum memadai sehingga dalam melakukan penanggulangan bencana menjadi sulit serta tidak didukung oleh jumlah staf yang cukup dan jumlah personil yang terlatih dibidang kebencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.

Belum terbentuknya tim Pusdalop dan TRC di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dapat mendata kejadian/ bencana yang terjadi, kemudian mengolah data kebencanaan yang akan dijadikan dasar untuk memberikan tindakan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana di daerah rawan bencana.

LAMPIRAN

Realisasi Rencana Aksi 2018

No	Sasaran			Realisasi	Capaian	Program	Kegiatan						Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Target				Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Pelayanan Tanggap Darurat yang Cepat dan Tepat	Persentase ketepatan tingkat waktu tanggap	TW 1 : 85%	85%	100%	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kali	6	TW1:-	TW1: 0%	
			TW 2 : 85%	85%	100%						TW2:-	TW2: 0%	
											TW3:6	TW3:100%	
											TW4:-	TW4: 0%	
			TW 3 : 85%	85%	100%		Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam	Cakupan Tersedianya Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam	Persen	100%	TW1:-	TW1:0%	
											TW2:-	TW2:0%	
											TW3:100%	TW3:100%	
											TW4:-	TW4:0%	
			Peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana	Terlaksananya Apel Siap Siaga Bencana	Kegiatan		1	TW1:-	TW1:0%				
								TW2:-	TW2:0%				
								TW3:-	TW3:0%				

											TW4:1	TW4:100%	
			TW 4 : 85%	85%	100%		Simulasi dan Peningkatan Keterampilan Aparat Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Simulasi Siaga Bencana	Kegiatan	1	TW1:-	TW1:0%	
											TW2:-	TW2:0%	
											TW3:-	TW3:0%	
											TW4:1	TW4:100%	
2	Meningkatnya Responsifitas Dalam Penanganan Bencana	Persentase tertanganinya korban bencana	TW 1 : 94%	85%	100%	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Pengeralahan SDM dan Logistik untuk Pemulihan Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase Tersedianya Logistik untuk pemulihan bencana	Persen	100%	TW1:100%	TW1:100%	
			TW 2 : 85%	85%	100%						TW2:100%	TW2:100%	
											TW3:100%	TW3:100%	
											TW4:	TW4:	
			TW 3 : 85%	85%	100%		Pos Komando Siaga Bencana	Cakupan operasional Pusdalops PB	Persen	100%	TW1:10%	TW1:100%	
											TW2:30%	TW2:100%	
											TW3:30%	TW3:100%	
			TW 4 : 85%	85%	100%						TW4:	TW4:	
			TW 1 : 85%	85%	100%	Program Pasca Bencana	Pendataan dampak kejadian	Cakupan terdatanya dampak	Persen	100%	TW1:100%	TW1:100%	
											TW2:	TW2:	

						bencana	kejadian bencana			100%	100%	
										TW3: 100%	TW3: 100%	
										TW4: 100%	TW4: 100%	
			TW 2 : 85%	85 %	100%							
			TW 3 : 85%	85 %	100%							
			TW 4 : 85%	85 %	100%							
						Pengemban gan partisipasi dan kerja sama rehabilitasi dan rekonstruksi	Persentase terkoordinas inya dengan pihak - pihak yang terkait dengan kejadian bencana	Persen	100 %	TW1: 100%	TW1: 100%	
										TW2: 100%	TW2: 100%	
										TW3: 100%	TW3: 100%	
										TW4: 100%	TW4: 100%	

Evaluasi hasil pelaksanaan renja BPBD Kota Banjarbaru

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan wajib pelayanan dasar sosial									
	Bidang Urusan Tata Usaha									
	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	721 lembar	330	391 lembar	391 lembar	100%	N/A	N/A	100%
	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Kelancaran Komunikasi, tersedianya Air bersih dan Penerangan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	100%
	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan	6 orang	6 Orang	6 orang	6 orang	100%	6 orang	6 orang	100%
	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	29 jenis	12 bulan	28 jenis	28 jenis	100%	29 jenis	29 jenis	100%
	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	12 bulan	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%

	Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Perlatan dan Perlengkapan Perkantoran	3 jenis	12 bulan	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72 bulan	36 Exspl	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
	Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat - rapat koordinasi di tingkat propinsi dan pusat	72 bulan	11 kali	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
	Kegiatan penyediaan jasa non PNS	Tersedianya jasa non PNS	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	2 orang	100%
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Kegiatan pengadaan gedung kantor	Tersedianya tempat parker	1 buah	N/A	1 buah	1 buah	100%	N/A	N/A	100%
	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas	7 unit	3 unit	4 Unit	4 Unit	100%	N/A	N/A	100%
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peraltan gedung kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	N/A	N/A	100%
	Kegiatan pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur aparatur	2 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	N/A	N/A	100%
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	2 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	N/A	2 paket	100%
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	60 bulan	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	60 bulan	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya perlatan mebeleur yang memadai	60 bulan	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%
	Program Peningkatan disiplin aparatur	Cakupan disiplin aparatur	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
	Kegiatan pengadaan pakaian khusus petugas pelayanan	Tersedianya pakaian khusus petugas	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	3 paket	50%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase Sumber daya aparatur memiliki	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%

	Aparatur	kopetensi sesuai bidangnya								
	Pendidikan dan pelatihan non formal	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100%	N/A	N/A	100%
	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	Tersedianya Dokumen laporan keuangan	60 laporan	10 Laporan	10 laporan	10 laporan	100 %	10 laporan	30 laporan	50%
	Kegiatan perencanaan dan pelaporan manajemen aset /barang	Tersedianya dokumen laporan aset/barang	60 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100 %	10 dokumen	30 dokumen	50%
	Bidang Urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan									
	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Presentase Ketepatan Tingkat Waktu Tanggap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	30 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	6 kali	6 kali	20%
	Kegiatan Pengadaan Saran Dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam	Cakupan Tersedianya Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
	Kegiatan Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Apel Siap Siaga Bencana	6 kegiatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	10%
	Kegiatan Simulasi Dan Peningkatan Keterampilan Aparat Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Simulasi Siaga Bencana	4 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	25%
	Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi	Tersedianya data pasca bencana	12 bulan	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	N/A	12 bulan	100%
	Kegiatan Kedaruratan dan Logistik	Tertanggulangnya secara darurat korban bencana	12 bulan	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	N/A	12 bulan	100%
	Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase penanggulangan kebakaran	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan peningkatan kesiagaan penanggulangan kebakaran	Terlaksananya kesiagaan dalam penanggulangan kebakaran	12 bulan	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	100%

	Bidang Urusan Kedaruratan dan Logistik									
	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Presentase Tertanganinya Korban Bencana	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
	Kegiatan Pengerahan SDM Dan Logistik Untuk Pemulihan bencana	Persentase Tersedianya Logistik untuk pemulihan bencana	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
	Kegiatan Menunjang Operasional Tanggap Darurat Bencana	Tersedianya aparatu/relawan tanggap darurat bencana	50 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Pos Komando Siaga Bencanas	Tersedianya aparaturn/relawan tanggap darurat bencana	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
	Bidang Urusan Rehabilitasi dan Rekontruksi									
	Program Pasca Bencana	Presentase Tertanganinya Korban Bencana	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
	Kegiatan Pengembangan Partisipasi Dan Kerjasama Rehabilitasi & Rekonstruksi	Persentase terkoordinasinya dengan pihak - pihak yang terkait dengan kejadian bencana	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
	Cakupan terdatanya dampak kejadian bencana	Cakupan terdatanya dampak kejadian bencana	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%